



PAPER – OPEN ACCESS

Model Penanggulangan Bencana Berbasis Sinergi Modal Sosial Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Kabupaten Konawe Sultra

Author : Sulsalman Moita dkk.,
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.636
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Model Penanggulangan Bencana Berbasis Sinergi Modal Sosial Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Kabupaten Konawe Sultra

Disaster Management Model Based on Social Capital Synergy and Values of Local Wisdom in Konawe Sultra Regency

Sulsalman Moita^a, Damsid^b, Syaifuddin Suhri Kasim^c, Sarmadan^d

^{a,b,c}Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Tridharma Anduonohu, Kendari 93231, Indonesia.

^dJurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Tridharma Anduonohu, Kendari 93231, Indonesia

Email : moitasulsalman@yahoo.co.id, damsid@mail.com, syaifudinsuhrikasim@gmail.com, sarmadhanamid1972@gmail.com

Abstract

Disaster management strategies that occur in each region, position the role and function of the Regional Disaster Management Agency as the institution most responsible for the provision of facilities and distribution of resources needed both before the occurrence of disasters and post-disaster. In fact, disaster management through government policies is generally not optimal, so other approaches are needed, such as the synergy approach of social capital and local wisdom values. The study was conducted in Konawe District with the aim of: 1) examining the problem of disaster management in the perspective of local government policy, 2) reviewing alternative models of disaster management based on synergy of social capital and local wisdom values. This study used a qualitative approach to the design of case studies in three villages that had experienced disasters. Data was collected using interviews, observations, and document studies. Research informants included district government officials, sub-district heads, village heads, community leaders, and community members. Data analysis using interactive qualitative analysis methods. The results of the research show that: 1) Problems in disaster management through government policy are not optimal stages of rescue and evacuation, fulfillment of basic needs, and recovery of public infrastructure and facilities; 2) The model of disaster management based on synergy of social capital and local wisdom values focuses on strengthening elements of social capital such as mutual trust, reciprocity, social norms, and social networking both during disasters and post-disaster with the support of local wisdom values sourced from social institutions from generations.

Keywords: Disaster Management, Social Capital, Local Wisdom;

Abstrak

Strategi penanggulangan bencana yang terjadi di setiap daerah, memosisikan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai institusi yang paling bertanggungjawab dalam penyediaan fasilitas dan distribusi sumber daya yang diperlukan baik sebelum terjadinya bencana maupun pasca bencana. Faktanya, manajemen penanggulangan bencana melalui kebijakan pemerintah pada umumnya belum optimal, sehingga diperlukan pendekatan lain seperti pendekatan sinergi modal sosial dan nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Konawe bertujuan: 1) mengkaji problematika manajemen penanggulangan bencana dalam perspektif kebijakan pemerintah daerah, 2) mengkaji alternatif model penanggulangan bencana berbasis sinergi modal sosial dan nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada tiga desa yang pernah mengalami bencana. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Informan penelitian mencakup aparat pemerintah kabupaten, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Problematika manajemen penanggulangan bencana melalui kebijakan Pemerintah adalah belum optimalnya tahapan penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan prasarana dan sarana umum; 2) Model penanggulangan bencana berbasis sinergi modal sosial dan nilai-nilai kearifan lokal memfokuskan pada penguatan elemen-elemen modal sosial seperti *mutual trust*, *reciprocity*, *social norms*, dan *social networking* baik pada saat terjadinya bencana maupun pasca bencana dengan dukungan nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber dari pranata sosial secara turun temurun.

Kata Kunci: Penanggulangan Bencana, Modal Sosial, Kearifan Lokal;

1. Pendahuluan

Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu wilayah yang sering mendapatkan bencana alam terutama banjir, longsor, angin puting beliung terutama di musim penghujan. Bencana tersebut hampir terjadi setiap tahun dengan mengisolasi sejumlah wilayah kecamatan/desa sehingga akses tempat tinggal, transportasi, lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan warga rusak, yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi terganggu sehingga memerlukan upaya pemulihan melalui manajemen penanggulangan bencana baik dalam ranah kebijakan pemerintah maupun partisipasi masyarakat.

Terjadinya bencana alam, tidak hanya disebabkan oleh faktor alamiah namun juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya seperti peningkatan jumlah penduduk yang kemudian memperlebar wilayah pemukiman sehingga tidak sejalan lagi dengan daya dukung lingkungan yang ada. Kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi lahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian juga turut mempengaruhi kondisi lahan atau alam yang berpotensi terjadinya bencana.

Di Kabupaten Konawe penanganan bencana alam, menempatkan posisi badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) sebagai insitusi yang paling bertanggungjawab terutama manajemen penanggulangannya. Tujuan penanggulangan bencana adalah untuk melindungi masyarakat dari peristiwa dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Menurut Widyastuti [1] penanggulangan bencana pada dasarnya merupakan aktivitas manajemen, yang tidak hanya mengandalkan kemampuan pemerintah karena pemerintah memiliki keterbatasan baik dalam sumber daya manusia, pendanaan, perlengkapan, maupun logistik. Manajemen penanggulangan bencana harus bersifat kesemestaan, melibatkan semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Paradigma baru penanggulangan bencana adalah berbasis masyarakat.

Penanggulangan bencana berbasis masyarakat menjadi urgen ketika manajemen penanggulangan bencana berbasis kelembagaan pemerintah belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan baik dalam penyelamatan dan evakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban maupun pemulihan prasarana yang terkena dampak bencana. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe terkendala oleh minimnya tenaga sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas, alokasi anggaran yang masih kurang, fasilitas penanggulangan bencana yang terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi masyarakat yang terkena dampak bencana.

Pendekatan modal sosial (*social capital*) menjadi salah satu alternatif pola penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat. Pendekatan modal sosial, selain memfokuskan kerjasama warga dalam jaringan yang berlandaskan pada spirit senasib sepenanggungan, kebersamaan, empati sosial, solidaritas; juga berlandaskan pada penguatan partisipasi dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi [2].

Selain penguatan modal sosial, eksistensi nilai-nilai kearifan lokal juga menjadi entitas yang dapat memberi pengaruh signifikan dalam penanggulangan bencana. Nilai kearifan lokal sebagai pengetahuan dan kebiasaan terbaik dari suku bangsa yang diwariskan secara turun temurun dapat disinergikan dengan elemen-elemen modal sosial, sehingga problematika manajemen penanggulangan bencana dalam ranah kebijakan Pemerintah yang belum optimal dapat dieliminir secara gradual, untuk keselamatan dan keseimbangan kehidupan masyarakat terutama yang terkena dampak secara langsung.

Berdasarkan hal di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) mengidentifikasi dan mengkaji problematika manajemen penanggulangan bencana dalam perspektif kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, dan 2) mengkaji alternatif model penanggulangan bencana berbasis sinergi modal sosial dan nilai-nilai kearifan lokal.

2. Kajian Literatur

2.1. Teori dan Konsep Modal Sosial (*Social Capital*)

Modal sosial merupakan kekuatan yang mampu membangun *civil community* yang dapat meningkatkan pembangunan partisipatif, dengan demikian basis modal sosial adalah *trust*, ideologi dan religi. Modal sosial dapat dicirikan dalam bentuk kerelaan individu untuk mengutamakan keputusan komunitas. Dampak dari kerelaan ini akan menumbuhkan interaksi kumulatif yang menghasilkan kinerja yang mengandung nilai sosial termasuk dalam penanggulangan bencana.

Putnam [3] menyatakan bahwa modal sosial sebagai ciri kehidupan sosial seperti jaringan kerja, norma, partisipasi, dan kepercayaan sosial yang membentuk interaksi dan kerjasama yang dapat saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Fukuyama [4] mendefinisikan modal sosial adalah serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara mereka. Lawang [5] dan Partha dan Ismail S [6], menekankan eksistensi modal sosial pada kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan kelompok secara efektif dan efisien.

Modal sosial bukan merupakan sebuah entitas tunggal tetapi berbagai macam entitas yang berbeda, dengan 2 elemen bersama: terdiri dari beberapa aspek struktur sosial, dan memfasilitasi tindakan pelaku-pelaku tertentu dalam struktur. Esensi modal sosial adalah produktif yang bermuara pada pencapaian tujuan tertentu. Sebagaimana modal fisik dan modal manusia, modal sosial sama sekali tidak *fungible* tetapi mungkin *specific* untuk aktivitas tertentu. Tidak seperti bentuk modal lain, modal sosial melekat dalam struktur hubungan antara para pelaku dan di antara para pelaku [7].

2.2. Konsep Penanggulangan Bencana

Pandangan konstruktif yang menempatkan bencana sebagai sesuatu yang dapat dikelola dan dikurangi risikonya [8]. Sebuah fenomena alam destruktif atau yang merusak tidak akan menjadi bencana yang sangat tragis jika masyarakatnya memiliki

kesiapan. Jatuhnya korban dan kerugian material akibat bencana sebenarnya mengisyaratkan ketidaksiapan individu, komunitas, maupun institusi dalam menghadapi resiko bencana.

Manajemen penanggulangan bencana menurut Widyastuti [1] seringkali disebut manajemen bencana. Esensi dari konsep ini adalah bahwa terhadap bencana yang timbul perlu dilakukan penanggulangan guna meminimalisir kerusakan, kerugian dan korban jiwa. Intarti [9] mengemukakan bahwa manajemen penanggulangan bencana menyiratkan pendekatan pemerintah secara keseluruhan untuk menggunakan sumberdaya komunitas guna melawan efek dari suatu peristiwa untuk jangka waktu tertentu sampai situasi dapat distabilkan.

Samekto & Nuh [10] menyatakan bahwa manajemen penanggulangan bencana sebagai lima fase generik manajemen yang mencakup: prediksi, peringatan, bantuan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Selanjutnya ia membagi manajemen bencana ke dalam empat tahap: kesiapsiagaan, tanggap darurat, pasca darurat, serta pencegahan dan mitigasi. Sedangkan manajemen penanggulangan bencana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 [11] tentang Penanggulangan Bencana hanya mencakup tiga tahapan yakni: pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

2.3. Konsep Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Discourses tentang kearifan lokal sering dikaitkan dengan masyarakat lokal. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya [12]. Pandangan lain dari Zulkarnain dan Febriamansyah [13] bahwa kearifan lokal merupakan prinsip dan cara-cara tertentu yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan ditransformasikan dalam bentuk sistem nilai dan norma. Selanjutnya Kongprasertamorn [14] berpendapat bahwa kearifan lokal mengacu pada pengetahuan yang datang dari pengalaman suatu komunitas dan merupakan akumulasi dari pengetahuan lokal.

Dengan demikian kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumberdaya alam dan manusia, pemertahanan adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan manusia.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus menjelaskan fokus kajian secara mendalam mengenai persoalan bencana alam yang terjadi di tiga lokasi karakteristik bencana yakni bencana banjir di Kecamatan Pondidaha, bencana tanah longsor di Kecamatan Sampara, dan bencana puting beliung di Kecamatan Tongauna Utara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi (pengamatan), diskusi kelompok terfokus (FGD) dan studi dokumentasi. Aspek yang diobservasi meliputi kondisi bencana alam di tiga kecamatan, kondisi geografis, kondisi kehidupan sosial ekonomi warga, tradisi dan nilai budaya sebagai kearifan lokal, dan elemen-elemen modal sosial. Selanjutnya wawancara

Aspek yang diperoleh melalui wawancara antara lain, nilai-nilai modal sosial yang tumbuh dan menguat sebelum dan sesudah bencana banjir, proses tumbuh dan hilangnya modal sosial di masyarakat serta relasi dan peran kelompok sosial yang menggorganisir masyarakat dalam mengatasi masalah banjir. Diskusi kelompok terfokus (FGD) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan modal sosial di tengah masyarakat baik di masa lalu maupun masa kini yang berubah akibat bencana banjir.

Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling dengan melihat karakteristik lokasi bencana banjir, terdiri atas: tokoh masyarakat pemerhati dan pengorganisir masyarakat dalam mengatasi masalah banjir (tokoh agama, tokoh Ormas, Ketua RT/RW), dan aparat pemerintahan bidang khusus yang mengatasi persoalan banjir di masyarakat (BPBD, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Tata Ruang).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Problematika Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Konawe

Idealnya pendekatan pemerintah dalam manajemen penanggulangan bencana (*mitigation*), kesiap-siagaan (*preparedness*). Sedangkan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe, hanya terbatas pada rangkaian tindakan manajerial dalam rangka pengalihan dan atau pengurangan dampak bencana yang mencakup: penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan prasarana dan sarana yang terkena dampak bencana.

Aktivitas manajemen penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda dalam peristiwa bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe secara kelembagaan menjadi tanggung jawab bidang kedaruratan dan logistik yang mengacu kepada standar operasional prosedur yang telah ada. Mekanisme pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana oleh aparat diselenggarakan secara terstruktur di bawah komando kepala badan serta memperhatikan tahapan tindakan yang telah ditetapkan. Dengan sistem terstruktur, setiap personil yang hendak melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana wajib mememebritahukan kepada khalayak baru kemudian melakukan aktivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung oleh aparat BPBD Kabupaten Konawe secara holistik belum konsisten dan memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Misalnya, kendala yang menyebabkan tindakan aparat dalam penanganan tidak tepat waktu, dikarenakan faktor akses yang terlalu jauh. Selain itu faktor kurangnya personil penanganan bencana menjadi alasan tidak maksimalnya prosedur standar yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam, aparat BPBD Kabupaten Konawe tidak melakukan sendiri tetapi berkoordinasi dengan warga setempat serta aparat lainnya termasuk Basarnas, TNI, Polri, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, dan warga masyarakat di lokasi atau di sekitar bencana baik secara berkelompok maupun secara perseorangan. Koordinasi dengan warga sekitar dalam penanganan bencana menjadi stimuli dinamika penanganan bencana berbasis keberfungsian sosial, hanya faktanya belum maksimal karena masih lemahnya koordinasi.

Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan kondisi yang sangat diharapkan oleh korban bencana dikarenakan semua potensi yang ada baik secara individu, keluarga, dan masyarakat sulit untuk dimaksimalkan. Hal tersebut juga berlaku untuk korban bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung di desa-desa dan kecamatan yang lokus penelitian. Sejumlah kebutuhan dasar yang diperlukan korban bencana seperti posko penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan.

Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana banjir diharapkan bersumber dari pihak-pihak yang paling dekat dengan keberadaan korban sendiri seperti komunitas terdekat, swasta, industri, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat BPBD yang bertanggungjawab atas penyediaan bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana, telah berusaha mengkoordinasikan penyediaan tenda, barak, mengidentifikasi gedung fasilitas umum/sosial yang dapat digunakan seperti tempat ibadah dan balai desa. Selanjutnya pemberian bantuan pangan di lokasi bencana pembuatan dapur umum, pendistribusian nasi bungkus, penyediaan air minum dalam kemasan. Kemudian bantuan nonpangan, seperti peralatan memasak dan makan, bantuan sandang (pakaian, selimut, jaket/sweater, sarung), bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan, dan sebagainya).

Bagi warga yang terkena bencana alam, sumber bantuan tidak menjadi perhatian serius, yang lebih penting adalah waktu pelaksanaan pemberian bantuan. Idealnya, penyusunan daftar penerima bantuan dilakukan sesegera mungkin, agar pengaduan bantuan dapat diupayakan dengan cepat dan pendistribusian dapat segera dilakukan serta didukung dengan pencatatan yang sistematis. Namun faktanya yang seringkali terjadi adalah pendistribusian bantuan sangat lambat karena manajemen pengelolaan bantuan belum tertib. Selain itu tak jarang distribusi bantuan tidak merata dan lebih menguntungkan pada lokasi-lokasi bencana dengan akses terbuka, sementara lokasi bencana dengan akses sulit membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selanjutnya bencana alam selalu menimbulkan kerusakan terutama bagi prasarana dan sarana yang terkena. Padahal, ketersediaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun untuk mendukung aktivitas sosial lainnya. Oleh karena itu, aktivitas pemulihan sarana dan prasarana yang terkena dampak bencana perlu mendapat perhatian serius dalam aktivitas manajemen penanggulangan bencana. Guna melakukan pemulihan sarana dan prasarana yang terkena dampak bencana dengan segera dan optimal maka tanggung jawab BPBD Kabupaten Konawe adalah mendata atau menginventarisir jumlah sarana dan prasarana publik yang rusak akibat bencana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, sejumlah fasilitas yang rusak di wilayah bencana seperti rumah penduduk, jalan, jembatan, gedung sekolah, kantor desa, puskesmas, dan sebagainya.

Temuan penelitian, mengungkapkan bahwa hasil pendataan kurang berkorelasi dengan pola pemulihan dan perbaikan fasilitas. Hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi dengan pihak/instansi terkait, proses pengambilan keputusan yang lambat, minimnya sarana dan dukungan anggaran bantuan kebencanaan yang masih kurang.

4.2. Model Penanggulangan Bencana Berbasis Sinergi Modal Sosial dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Manajemen penanggulangan bencana dalam persepektif kebijakan dan program pemerintah daerah, faktanya belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat yang terkena secara langsung dampak bencana sehingga diperlukan alternatif lain yang bersifat kolaboratif, substitusi, dan komplementer yang salah satunya adalah lahir dari realitas sosial melalui penguatan elemen-elemen modal sosial. Modal sosial dalam riset ini juga dapat dimaknai sebagai wahana keberfungsian sosial dengan melibatkan kesadaran dan peran serta masyarakat secara aktif dan reaktif dalam penanganan bencana baik pra bencana, terjadinya bencana, maupun pasca bencana melalui aktivitas pemulihan dan rehabilitasi. Pemanfaatan elemen-elemen modal sosial jika disinergikan

dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam penanggulangan bencana akan lebih bermakna karena muncul dari entitas kebiasaan turun temurun (tradisi nenek moyang), sehingga dapat menjadi alternatif selain pola penanggulangan bencana berbasis manajemen Pemerintah Daerah.

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat etnis suku Tolaki yang mayoritas mendiami wilayah Kabupaten Konawe. Terdapat sejumlah nilai-nilai kearifan lokal yang dapat sinergikan dengan elemen-elemen modal sosial, sehingga dapat dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana.

Tabel 1. Pemetaan Model Penanggulangan Bencana Berbasis Sinergi Modal Sosial dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal

No	Elemen-Elemen Modal Sosial	Indikator	Sinergi Nilai-Nilai Kearifan Lokal	Konsekuensi
1	Resiprositas (Relasi Timbal Balik)	Tolong menolong	Samaturu, mesumba/ mesoko (pertukaran sosial)	Penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar,
2	Nilai dan Norma Sosial	Sistem Pengetahuan Pola pemukiman	Gejala/tanda-tanda alam, suara binatang Laika mbuu, laika niwuatako, o ala (rumah panggung)	Kesiap-siagaan/pra bencana
3	Jaringan Sosial (<i>social networking</i>)	Kelembagaan Kerjasama	Filosofi hidup Medulu mepokoaso, teporombu	Pemenuhan sarana dan prasarana

Sumber: Data primer di analisis.

Model penanggulangan bencana berbasis sinergi modal sosial dan nilai-nilai kearifan lokal diawali dengan eksistensi elemen resiprositas melalui spirit tolong menolong. Tolong-menolong merupakan kebiasaan leluhur (nenek moyang) etnis lokal (Tolaki) yang umumnya dilakukan dalam aktivitas pertanian/berladang (*mondau*), mendirikan dan memperbaiki rumah (*mowai oraha*), acara seremoni/pesta (*tekonggo*), upacara panen (*mosowi*), mencari hasil hutan (*meo'ahoma*) dan sebagainya.

Eksistensi elemen resiprositas dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan, karena bencana dapat terjadi secara tiba-tiba dan menghancurkan kondisi lingkungan pemukiman, potensi ekonomi penduduk, dan fasilitas umum. Mengandalkan bantuan pemerintah dengan proses evakuasi korban dan pemulihan tentu memerlukan waktu dan koordinasi yang relatif cukup lama, apalagi dengan akses dan fasilitas yang terbatas. Melalui nilai *samaturu*, warga digerakkan oleh spirit kesadaran dan kebersamaan tanpa komando atau perintah untuk membantu korban bencana. Prinsip *samaturu* adalah esensi dari pertukaran sosial yang dilakukan secara bersama-sama (gotong royong) guna membantu korban bencana secara cepat dan tepat dengan mengerahkan seluruh potensi sumber daya yang ada.

Temuan penelitian juga mengungkapkan keberadaan nilai *mesoko* dalam proses pemulihan bencana. *Mesoko* adalah kebiasaan turun temurun dalam bentuk tukar tenaga, dengan prinsip jika seseorang membantu orang lain yang terkena dampak bencana, maka kewajiban korban bencana tersebut membalas kebaikan dikemudian hari. Dengan demikian terdapat *moral obligations* yang harus ditaati dan dihormati oleh kedua belah pihak walaupun tidak diikat melalui mekanisme perjanjian secara formal. Nilai *mesoko* dalam penanggulangan bencana menunjukkan kepedulian terhadap sesama yang juga merupakan refleksi dari nilai-nilai keberagamaan.

Bentuk resiprositas lainnya dalam penanggulangan pasca bencana adalah kebiasaan *mesumba* baik dalam bentuk financial maupun sumbangan material. Warga yang terkena dampak bencana trauma karena kehilangan harta benda, tanaman pertanian, ternak akibat banjir, tanah longsor dan angin puting beliung. Guna memulihkan kondisi psikologis korban bencana, maka biasanya terdapat tradisi relasi timbal balik (resiprositas) melalui sumbangan yang dikumpulkan warga berdasarkan kerelaan atau keikhlasan. Dana dan materi yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan oleh warga korban bencana untuk membangun atau memperbaiki rumah, membeli perabot rumah tangga, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya.

Selanjutnya, keberadaan *elemen nilai dan norma sosial*, merupakan strategi adaptif yang dilakukan untuk mempertahankan keberadaan mereka di wilayah bencana. Setiap program yang dikembangkan oleh banyak pihak di lokasi juga menunjukkan upaya untuk mengadaptasikan diri dengan situasi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, sehingga memerlukan bantuan baik dalam bentuk psikis maupun fisik. Secara empiris, strategi adaptasi yang muncul dalam upaya mengantisipasi banjir di antaranya dengan pola pemukiman membangun rumah dua lantai yang disebut *laika mbuu* (rumah panggung besar) atau *laika tolo* (rumah panggung kokoh) dan *o' ala* (rumah kecil untuk menaruh padi sebagai bahan pangan di musim kemarau).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sejumlah rumah korban banjir dengan desain rumah panggung (*laika niwuatako*, *laika mbuu*), umumnya tidak mengalami dampak yang signifikan karena benda-benda/peralatan rumah tangga tidak terbawa arus air dan rusak; kemudian, petani yang menyimpang padi di lumbung (*o ala*), bahan/cadangan makanan pokok tersebut terselamatkan karena berada di titik ketinggian.

Membangun rumah panggung selain menjadi pola adaptasi untuk survivalitas dalam menghadapi bencana banjir di masa yang akan datang, juga mengantisipasi proses relokasi yang dilakukan oleh pemerintah, di mana warga belum tentu sepakat dengan tempat baru karena terdapat beberapa pertimbangan seperti alasan ekonomi, sosial, dan akses. Misalnya, korban banjir yang terjadi di Kecamatan Pondidaha menolak relokasi karena alasan ekonomi, padahal pemukiman mereka berada di pinggir sungai

yang rawan banjir dan longsor. Demikian pula, warga di Desa Pohara Kecamatan Sampara dengan pemukiman di bibir sungai Konaweaha, sebagian menolak di relokasi karena sungai menjadi sumber mata pencaharian utama sebagai pencari pasir.

Nilai dan norma sosial etnis lokal selanjutnya adalah sistem pengetahuan yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural dalam meramalkan terjadinya bencana' seperti kepercayaan akan bunyi binatang, suara burung, tanda-tanda alam, dan intuisi dukun (mbuakoy, mbuowai). Walaupun nilai ini bertentangan dengan pemikiran positivisme, namun tak jarang dipercaya oleh sebagian warga sehingga mereka dapat mempersiapkan atau mengantisipasinya sebelum terjadinya bencana.

Elemen jaringan sosial sebagai pilihan dalam penanggulangan bencana mendorong cara bekerjanya pranata sosial berbasis kelembagaan. Hal ini juga memberi kesempatan kepada pihak lain (stakeholder) dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana. Masyarakat idealnya, tidak beranggapan bahwa tugas menjaga kebersihan sungai dan merawat lingkungan bukan lagi menjadi tanggung jawab mereka, karena sudah ada pemerintah yang secara rutin melakukan upaya pengerukan untuk mencegah terjadinya luapan air hujan ke permukiman masyarakat.

5. Kesimpulan

Problematika penanggulangan bencana di Kabupaten Konawe, memposisikan peran Pemerintah Daerah yang belum maksimal terutama dalam proses mitigasi dan kesiap-siagaan bencana. Ironisnya program penanggulangan pasca bencana yang mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dibatasi oleh minimnya anggaran dan fasilitas penanggulangan, akses dan sumber daya manusia yang terbatas, serta manajemen kelembagaan berbasis kolaboratif dengan stakeholder yang masih sangat lemah.

Model penanggulangan bencana berbasis sinergi modal sosial dan nilai-nilai kearifan lokal, memetakan tiga dimensi hubungan yaitu: 1) penguatan elemen resiprositas melalui semangat tolong menolong warga yang disinergikan dengan nilai *samaturu* (gotong royong), mesumba (sumbangan financial dan material), dan mesoko (tukar tenaga); 2) penguatan elemen nilai dan norma sosial melalui bekerjanya sistem pengetahuan dalam meramalkan terjadinya bencana melalui gejala/tanda-tanda alam, bunyi suara burung/binatang, dan ramalan tokoh dukun/tabib (*mbuoway* dan *mbuakoy*); kemudian pola pemukiman yang mendirikan atau menempati rumah panggung sebagai tindakan preventif sebelum terjadinya bencana; dan 3) penguatan penguatan elemen jaringan sosial, mendorong bekerjanya kelembagaan berbasis adat istiadat melalui tradisi *medulu/mepokoaso* dan *teporombu* yang memaksimalkan gerakan bersama semua stakeholder untuk membantu proses penanggulangan dan pemulihan bencana.

Referensi

- [1] Widyastuti, L. 2012. *Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Daya Mitigasi dan Adaptasi Bencana*. Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN.
- [2] Hasbullah, J. 2010. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press.
- [3] Putnam, Robert D. 1993. *Making Democracy Work Civic Traditions in Modern Italy*. New Jersey: Princeton University Press.
- [4] Fukuyama, F. 1995. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- [5] Lawang R, M.Z. 2004. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Fisip UI-Press.
- [6] Partha D., Ismail S. 1999. *Social Capital A Multifaceted Perspective*. Washington DC: The World Bank.
- [7] Eko, Sutoro, 2004. *Modal Sosial, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal, dalam Jurnal Analisis CSIS*, Vol.33, No.3, Sept 2004, Jakarta: CSIS.
- [8] Indiyanto, A. & Kuswanjono, A. (ed) 2012. *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana*. Bandung: Mizan.
- [9] Intarti, Yuni R. 2013. "Efficient Prediction of Earthquake Damage based on Wireless Personal Area Networks", Research From Dikti-JSPS.
- [10] Samekto, Christ Bangun Dwi & Nuh, Muhammad. 2017. *Evaluation of community-based settlement reconstruction program: Case study in post-disaster recovery of 2010 Merapi volcano eruption in Cangkringan district, Sleman regency, Yogyakarta Province*. Journal Public Administration Studies, Vol 1 no. 3.
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*.
- [12] Sartini, 2004. *Mengelola Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati*. Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat UGM, Vol 14, No. 2.
- [13] Zulkarnain dan Febriamansyah. 2017. *Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Wisata Kerajinan Tangan di Dusun Rejoso Kota Batu*. Local Wisdom Scientific Journal, Vol 9, No. 1.
- [14] Kongprasertamorn, K. 2007. *Local Wisdom Environmental Protection and Community Development: The Clam Farmers in Tambon Bangkhunsai*. Phetchaburi Province, Thailand. Journal of Humanities, 10, 2-3.